

PENGARUH KONFLIK DI SELATAN FILIPINA TERHADAP HUBUNGAN FILIPINA DENGAN AMERIKA SERIKAT

SRI MURYANTINI

*Strategi dan Keselamatan, Fakultas Sain Sosial dan Keselamatan,
University Kebangsaan Malaysia*

ABSTRAK

Konflik di Selatan Filipina telah berlangsung sejak lama. Konflik ini merupakan konflik yang pada awalnya berkaitan dengan agama dan tanah. Namun lama kelamaan, konflik ini berkaitan dengan geografi, sejarah dan juga faktor kepentingan. Hanya saja konflik ini mengalami pasang surut.

Sejarah Filipina mengatakan bahwa bangsa Spanyol yang datang pada abad ke 16, mula-mula mereka hanya berusaha untuk menguasai kawasan Luzon dan kepulauan utara yang lain yang dikenal sebagai Filipina. Setelah kawasan ini berhasil dikuasai, maka Spanyol mulai melebarkan wilayah jajahannya dengan mengalihkan perhatiannya kepada Mindanao dan Sulu, tetapi kesultanan dibagian selatan ini selalu berhasil mengusir Spanyol dari wilayahnya selama lebih dari 300 tahun. Ketika Spanyol berkuasa, Spanyol melakukan misi pengkristenan atas wilayah-wilayah di Filipina bagian utara, sehingga ini menyebabkan semua orang Muslim lari menuju ke selatan Filipina. Pada akhirnya Spanyol berhasil menguasai Moro dengan melakukan migrant penduduk Kristen di Filipina Utara secara besar-besaran ke wilayah Moro yang berada di selatan.

Adanya Perjanjian Paris pada Desember 1898 antara Spanyol dengan Amerika Serikat telah menyebabkan Spanyol menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya di Filipina kepada Amerika Serikat termasuk kawasan Mindanao dan Sulu, yang bukan sepenuhnya di bawah pengaruh Sepanyol. Di bawah kekuasaan Amerika Serikat ini, akhirnya Moro dapat dikuasai dan dimasukkan ke dalam kesatuan negara Filipina walaupun bangsa Moro sendiri tidak bersedia dimasukkan ke dalam Filipina. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat memberikan jaminan kemerdekaan kepada Filipina pada 4 Juli 1946.

Konflik ini dari hari ke hari semakin bertambah buruk saja, terdapatnya jurang ekonomi antara yang Kristen dengan yang Islam sebagai akibat dari migrasi telah menyebabkan bangsa Moro menjadi bangkit untuk melawan ketidakadilan dengan melalui MNLF (*Moro National Liberation Front*). Usaha yang dilakukan oleh MNLF tidak hanya pada peperangan saja tapi ia juga melakukan jalan diplomasi dengan meminta pengakuan dari OIC. MNLF meminta kepada OIC agar diakui sebagai perwakilan muslim dari Filipina.

1. PENDAHULUAN

Konflik di Selatan Filipina telah berlangsung sejak lama. Konflik ini merupakan konflik yang pada awalnya berkaitan dengan agama dan tanah. Namun lama kelamaan, konflik ini berkaitan dengan geografi, sejarah dan juga faktor kepentingan. Hanya saja konflik ini mengalami pasang surut.

Konflik di selatan Filipina ini dimulai sejak Spanyol datang ke Filipina hingga sekarang. Berbagai perjanjian sudah ditandatangani namun selalu saja timbul konflik. Mengapa konflik yang melibatkan suku Moro ini tidak kunjung reda? Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredakan konflik ini? Ini sangat menarik untuk dikaji dan akan memberikan pengetahuan kepada kita untuk mempelajari bagaimana cara menangani suatu konflik yang telah berlangsung sangat lama.

2. KONFLIK DI SELATAN FILIPINA

Mindanao-Sulu merupakan suatu kawasan di Filipina yang mempunyai pemerintahan yang independen bagi penduduk asli setempat. Islam tiba di wilayah ini pada abad ke-8 masehi melalui

para pedagang Arab sampai pada akhir abad ke-13. Pada akhirnya, pada abad ke-14 Islam berkembang dan diterima oleh penduduk setempat.

Tahun 1565, Spanyol mulai memasuki wilayah selatan Filipina yaitu pulau Mindanao dan kepulauan Sulu. Spanyol menyerang pulau Mindanao selama 350 tahun. Bangsa Spanyol menyebut penduduk Mindanao sebagai bangsa Moro diambil dari "*Moors*" dalam sejarah Spanyol seorang yang pernah menguasai Spanyol. [1] Abad ke-19 Kesultanan Mindanao mengizinkan Bangsa Spanyol masuk ke wilayah bagian utara pulau Mindanao untuk melakukan usaha bisnis. Pada akhirnya, Spanyol berhasil menguasai secara penuh kawasan kepulauan Filipina juga berhasil merubah penduduk lokal dengan melalui misi kristenisasi (*catholicism*).

Tahun 1898, Amerika Serikat (AS) menang dalam perang AS-Spanyol. Filipina akhirnya menjadi dibawah kontrol AS. Wilayah Mindanao-Sulu yang pada masa kolonialisasi Spanyol tidak berada dalam kontrol Spanyol, tetapi Spanyol memasukan wilayah ini dalam penyerahan kekuasaan Filipina ke AS. Akhirnya, pertempuran berdarah antara muslim Mindanao dengan penjajah AS yang berakhir dengan perjanjian antara Sultan Mindanao dengan AS yang dikenal dengan "*Treaty Bates*" pada 22 Agustus 1899. Perjanjian ini tidak bertahan lama tiba-tiba tahun 1902, AS memasukan wilayah Mindanao ke dalam pembentukan Filipina tanpa persetujuan dari penduduk setempat. Pada tahun 1940, AS menghapuskan kesultanan dan kawasan Mindanao dimasukan ke dalam sistem administratif Filipina. Tahun 1946, ketika Filipina, bangsa Moro menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah AS yang disampaikan dalam memorandum Mindanao dan Sulu yang berisi tidak akan mau dimasukan ke dalam kemerdekaan Filipina karena pulau mereka tidak akan diberikan kepada masyarakat yang bukan bangsa kami (Moro), bahkan menurut mereka tidak pantas apabila didalam satu negara ada dua pihak yang saling bermusuhan. Akan tetapi, AS tidak menerima proposal tersebut. [2]

Pada masa pembangunan, pemerintah Filipina tidak mengakui hukum adat Moro. Ini karena adanya perasaan dendam dari pemerintah Filipina terhadap bangsa Moro atas penyerangan pusat pemerintahan di Manila. Sehingga, menimbulkan ketegangan antara penduduk minoritas muslim Moro dengan para pendatang pada pemberontakan bangsa Moro tahun 1960-1970. Pada pertengahan tahun 1971, Nur Misuari membentuk Front Pembebasan Nasional Moro (*Moro National Liberation Front*) sebagai akibat dari tragedi Jabidah di Corregidor pada 18 Maret 1968 yang merenggut nyawa 28 Muslim yang sebagian besar adalah dari etnis Tausug dari Sulu dan Tawi-Tawi, memicu momentum awal dari gerakan modern Moro untuk memisahkan dari Filipina sebagai ras yang independen. [3] Secara historis, ini adalah refleksi dari identitas Moro yang sebenarnya tidak merupakan bagian dari Filipina. Untuk Moro, kedaulatan mereka telah dicapai jauh sebelum negara itu, Filipina dibentuk. Jadi tidaklah mengherankan bahwa bahkan sampai hari ini, panggilan untuk kemerdekaan masih merupakan prioritas beberapa faksi kelompok gerakan yang muncul setelah MNLF seperti MILF, Abu Sayyaf dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Tujuan dibentuknya MNLF adalah untuk mencapai kebebasan penuh kepada bangsa Moro dan merdeka dari penjajahan Filipina.

Sejarah pada masa kolonial Spanyol dan Amerika Serikat, keduanya berpihak sepihak terhadap bangsa Moro dan telah membohongi bangsa Moro misalnya AS tidak bisa memberikan hak bangsa Moro untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*). Awal tahun 1970 terjadi pemberontakan dan penyerangan oleh tentara Filipina terhadap markas MNLF di pulau Mindanao. Menurut perkiraan pemerintah sekitar 18 orang setiap harinya meninggal pada tahun 1970-1976, telah menghabiskan dana sekitar US\$ 130 juta dan sekitar 11.000 tentara mati terbunuh pada tahun 1972-1980. Selanjutnya, terjadi gencatan senjata tahun 1973 antara kedua belah pihak karena adanya embargo minyak terhadap negara-negara yang mendukung Israel dari *the Organization of Arab Petroleum-Exporting Countries* adapun Filipina sebagai salah satu negara pendukungnya. [4]

Tahun 1976, pemerintah Filipina dan pimpinan MNLF melakukan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Tripoli melalui mediasi Organisasi Konferensi Islam (OKI), perjanjian ini dipimpin oleh Libya. Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa poin yaitu hak otonomi daerah untuk 13

provinsi di Mindanao, Sulu dan kepulauan Palawan sebagai wilayah yang paling berpengaruh terhadap MNLF. Otonomi penuh diberikan pada bidang pendidikan dan pengadilan sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap berada di bawah kebijakan pemerintah pusat Filipina. Perjanjian tersebut tidak ditaati karena banyaknya penafsiran sehingga tidak bisa diimplementasikan. Gagalnya perjanjian Tripoli menyebabkan MNLF kembali menyerang militer Filipina. Saat itu juga terjadi peristiwa besar dimana MNLF terpisah menjadi 2 bagian yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dipimpin oleh Salamat Hashim dan MNLF dipimpin oleh Dimas Pundatu. [5]

Tahun 1986 presiden Marcos digantikan oleh presiden Cory Aquino. Aquino melakukan pertemuan dengan Nur Misuari dan MNLF di Sulu. Pertemuan ini menimbulkan kemarahan pimpinan MILF karena pemerintah Filipina tidak mengajak perwakilan dari MILF juga. Langkah tersebut sebagai jalan pembuka untuk melakukan negosiasi. Sayangnya, ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai kesepakatan.

Pada 2 september 1996 dibawah pimpinan Fidel V.Ramos telah ditandatangani perjanjian "*Final Peace Agreement*" (FPA). Perjanjian tersebut telah berhasil mengawali terbentuknya proses rekonsiliasi terhadap MNLF saja tidak termasuk komunitas MILF. Akan tetapi hal ini hanya membawa keuntungan bagi MNLF sebagai pihak yang melakukan perjanjian, adapun MILF menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah Filipina.[6] Pada masa pemerintahan presiden Estrada terjadi pembombardiran tentara Filipina AFP terhadap MILF. Aksi *All out War* berhasil menghancurkan kamp Abu Bakar merupakan salah satu kamp terbesar MILF yang dikelilingi komunitas pemukiman Muslim. Dengan demikian masalah ini malahan menjadikan penginternasionalisasian konflik antara pemerintah Filipina dengan MILF, sehingga menjadikan awal bagi MILF untuk membangun perjuangan secara diplomatik dalam forum internasional terutama di OKI.[7]

Dalam hal perjanjian 1996, RA 6734 seharusnya dicabut atau diubah, dan undang-undang baru dihukum plebisit dengan September 1998. Tapi walaupun undang-undang telah disusun pada tahun 1998, plebisit itu dijadwal ulang, dua kali. Akhirnya, pada bulan Agustus 2001, kendati ada keberatan dari Misuari dan MNLF, referendum yang telah lama ditunggu-tunggu untuk pada perluasan yang diusulkan ARMM diadakan. Tidak mengherankan, dari (sekarang) provinsi lima belas dan sembilan kota yang tercakup dalam SZOPAD hanya lima provinsi dan satu kota memilih setuju. Tak lama setelah ini, pemilihan umum untuk ARMM terjadi dan dalam pemilihan gubernur, Misuari telah digantikan oleh calon saingan yang didukung oleh presiden yang baru menjabat, Gloria Macapagal-Arroyo. Misuari kemudian membuat ancaman untuk kembali ke bukit-bukit, melancarkan serangan bersenjata terhadap pasukan pemerintah sebelum melarikan diri ke Malaysia, di mana ia ditangkap dan dipulangkan pada Mei 2001. Dia sekarang menghadapi pengadilan atas tuduhan pemberontakan.[8]

Hubungan Filipina dengan Amerika Serikat

Hubungan Filipina dengan Amerika Serikat (AS) juga mengalami pasang surut. Pertama hubungan bilateral di antara mereka terjadi manakala AS melakukan penjajahan terhadap Filipina. Setelah AS memberikan kemerdekaan pada Filipina maka ia berhak memperoleh fasilitas untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer di Filipina tanpa pembayaran kompensasi ganti rugi. Pada tahun 1947, *Manila Act* ditandatangani antara AS dengan Filipina yang merupakan Pakta Pertahanan Bersama yang memberikan jaminan AS untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer di Filipina untuk jangka waktu 99 tahun.[9]

Baru pada tahun 1966 dirumuskan suatu perjanjian yang merubah jangka waktu penggunaan dari 99 tahun menjadi 25 tahun, sehingga penggunaan pangkalan militer itu berakhir tahun 1991. Dalam *Military Bases Agreement (MEA)* tahun 1966 disepakati, bahwa sebagai kompensasi AS membayar *Security Assistance* sebesar US \$500 juta untuk jangka waktu 5 tahun, kemudian setiap 5 tahun berikutnya akan diadakan reorganisasi. [10]

Besaran jumlah uang kompensasi ini berbeda-beda untuk masing-masing presiden, tergantung bagaimana situasi politik dalam negeri Filipina. Misalnya pada masa Presiden Marcos, besarnya kompensasi itu berubah-ubah dimana perubahannya justru menekan pihak Marcos dan menjadi isu politik. Campur tangan AS terhadap urusan dalam negeri Filipina serta dukungannya yang banyak memberikan pengaruh dan kekuatan bagi rezim Marcos.

Dengan terjadinya serangan terhadap gedung WTC pada 11 September 2000 telah menyebabkan AS merubah haluan politik luar negerinya dengan memerangi terorisme dimana saja terutama untuk kelompok yang diduga ada hubungannya dengan Osama bin Laden. Perang melawan terorisme ini pertama kali digelar di Afghanistan lalu ada tahap berikutnya berlanjut di Filipina, Indonesia, Somalia dan Yaman, seerti yang dikatakan Deputy Menhan AS, Paul Wolfowitz bahwa yang menjadi prioritas utama adalah kelompok separatis di Selatan Filipina.[11]

Sementara itu, pada saat yang bersamaan Filipina mengalami kemerosotan ekonomi akibat pengaruh dari dunia dan juga adanya pemberontakan dari suku Moro, telah menyebabkan presiden Filipina untuk kembali menerima tawaran kerjasama militer dari AS dengan harapan uang kompensasi dapat digunakan untuk memperbaiki perekonomian dalam negerinya dan militer AS dapat membantu Filipina dalam mengatasi pemberontakan suku Moro.

Hasil dari kerjasama ini, telah membuat Abu Sayasa yang merupakan pimpinan tertinggi Abu Sayyaf meninggal dunia, namun gejolak di Selatan Filipina tidak juga semakin mereda malahan mereka semakin eksis untuk mempertahankan wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya konflik Filipina ini tidak perlu berlarut larut kalau masing masing pihak mau mengalah. Memang seperti yang dikatakan Kamarulzaman Askandar bahwa semua pihak harus menjaga proses perdamaian yang telah disepakati. Dan tidak semua orang yang ingin kembali ke masa lalu. Tapi kita ingin melihat bahwa pihak yang berkonflik diselesaikan dalam frame yang lebih maju dan bermartabat.